

HASIL WAWANCARA

Narasumber : Kasubbag TU UPT Monas

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Bagaimana latar belakang dan payung hukum pembentukan UPT Monas ?	<p>Pada awalnya tugu nasional dikelola oleh suatu badan pengelola tugu nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur KDKI Jakarta Nomor 492/1978 tanggal 23 Agustus 1978. Badan pengelola tersebut memiliki kewenangan mengelola tugu nasional. Namun karena tugu dan taman monumen nasional merupakan suatu kesatuan, maka dikeluarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 610/1986 yang membentuk badan pengelola monumen nasional yang memiliki tugas mengelola keseluruhan monumen nasional mulai dari tugu nasional hingga taman monumen nasional.</p> <p>Badan pengelola kemudian direvisi menjadi Kantor Pengelola Monumen Nasional yang ditetapkan berdasarkan Perda DKI Jakarta Nomor 13 Tahun 1991, dengan mengacu kepada Keputusan Mendagri Nomor 54 Tahun 1991 tentang Pedoman pembentukan organisasi dan tata kerja kantor pengelola monumen nasional DKI Jakarta.</p> <p>Setelah dikeluarkannya Keputusan Gubernur Nomo 158 Tahun 2000 tentang Juklak pengelolaan dan pelestarian monumen nasional di Propinsi DKI Jakarta yang sebagian kewenangannya (tugu nasional) diserahkan ke Dinas Kebudayaan dan Permuseuman. Maka Dinas Kebudayaan dan Permuseuman berdasarkan Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 134 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPT di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Permuseuman Propinsi DKI Jakarta membentuk UPT (Unit Pengelola Teknis) Monumen Nasional yang merupakan unit pelaksana teknis Dinas Kebudayaan dan Permuseuman di bidang pengelolaan dan pelestarian monument nasional. Unit pengelola monumen nasional dipimpin</p>

		oleh seorang kepala unit yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepala kepala dinas.
2.	Bagaimana uraian tugas dari UPT Monas ?	<p>UPT Monas mempunyai tugas mengelola dan melestarikan monumen nasional dengan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyusunan program dan rencana kegiatan operasional b. Perawatan monumen dan taman medan merdeka dengan segala fasilitas kelengkapannya. c. Penyelenggaraan usaha-usaha, promosi, publikasi dan pameran. d. Penyusunan rencana dan pengusulan pengadaan koleksi serta sarananya. e. Pelaksanaan pembuatan deskripsi dan registrasi koleksi. f. Penyimpanan penataan dan perawatan koleksi. g. Pemberian bimbingan dan pelayanan edukatif cultural kepada masyarakat. h. Penyelenggaraan pengelolaan perpustakaan i. Pelayanan informasi yang menyangkut nilai-nilai perjuangan bangsa. j. Penjagaan ketertiban, keamanan dan kebersihan lingkungan. k. Kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pengelolaan dan pelestarian museum nasional. l. Pelaksanaan kegiatan tata usaha
3.	Sampai sejauh mana ruang lingkup kewenangan yang dimiliki oleh UPT Monas ?	<p>UPT Monas sepatutnya merupakan koordinator dalam segala kegiatan pengelolaan yang selama ini dikelola secara parsial oleh unit-unit teknis lainnya. Dalam artian segala kegiatan mulai dari perencanaan hingga evaluasi harus melibatkan pihak UPT Monas. Namun berdasarkan pelaksanaan di lapangan UPT Monas hanya memiliki kewenangan terhadap tugu nasional mengingat Dinas Kebudayaan dan Museum merupakan dinas teknis yang memiliki</p>

		<p>kapasitas dalam pengelolaan museum saja.</p> <p>Selain dari tugu nasional, semua pengelolaan diserahkan kepada 12 unit dinas teknis terkait sebagaimana diuraikan dalam Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 158 Tahun 2000 tentang Juklak pengelolaan dan pelestarian monumen nasional. Semuanya terbagi dalam bidang-bidang tugas masing-masing sesuai dengan kapasitas dinas teknisnya.</p>
4.	<p>Bagaimana koordinasi antar dinas teknis yang secara bersama-sama melaksanakan pengelolaan monumen nasional ?</p>	<p>Pelaksanaan koordinasi diatur dalam Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 158 Tahun 2000 tentang Juklak pengelolaan dan pelestarian monumen nasional yang membagi bidang tugas sesuai dengan kapasitas dinas teknisnya. Dalam KepGub tersebut dijelaskan bahwa dalam melaksanakan pengembangan, penataan, pemeliharaan dan pengamanan monumen nasional, kantor pengelola agar melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Artinya bahwa seluruh kegiatan seharusnya di bawah koordinasi UPT Monas sedangkan dinas teknis memberikan bimbingan dan pelaksanaan proyek sebagaimana direncanakan oleh kantor pengelola monas.</p>
5.	<p>Sarana apa yang digunakan oleh UPT Monas dalam melaksanakan koordinasi antar dinas teknis terkait ?</p>	<p>Dalam Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 158 Tahun 2000 tentang Juklak pengelolaan dan pelestarian monumen nasional, diamanatkan untuk melaksanakan koordinasi dan sarana yang paling tepat adalah dengan membuat perencanaan teknis penataan monumen nasional secara bersama-sama dengan mengadakan rapat koordinasi yang menghadirkan seluruh instansi terkait dalam pengelolaan monumen nasional.</p> <p>Rapat koordinasi tersebut juga sekaligus sebagai bahan evaluasi rutin terhadap kegiatan penataan monas yang harus dilaksanakan untuk implementasi Keppres Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka sehingga tiap unit/instansi tahu pembangunan fisik/kegiatan apa yang belum mereka laksanakan.</p>

6.	Bagaimana intensitas pelaksanaan rapat koordinasi ?	<p>Pada awalnya pelaksanaan rapat koordinasi dilakukan secara regular tiap 1 bulan sekali dengan bertempat di Sekretariat Tim penasehat pembangunan kawasan medan merdeka di Dinas Pertamanan. Rapat ini membahas rencana kegiatan yang akan dilaksanakan serta pemikiran-pemikiran dan para pakar untuk melanjutkan pembangunan fisik kawasan medan merdeka.</p> <p>Namun pelaksanaan rapat koordinasi, pada saat ini sudah tidak berjalan secara regular, artinya bila ada suatu hal yang sangat penting saja, maka dilakukan rapat koordinasi. Sehingga dapat dikatakan intensitas rapat koordinasi sangat minim sekali dilaksanakan.</p>
7.	Bagaimana keterlibatan stake holder lain (para pemerhati kota, dewan pakar, dan lain-lain) ?	<p>Pada awalnya tim pakar yang tergabung berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1102 Tahun 1995 tentang Pengangkatan Tim Penasehat Pembangunan Kawasan Medan Merdeka melakukan rapat rutin bulanan dan hasil rapatnya disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada Gubernur Propinsi DKI Jakarta. Namun mengingat pembangunan di kawasan taman medan merdeka mulai tahun 1998 sudah tidak banyak lagi, maka tim tersebut sudah tidak melaksanakan rapat untuk membuat rekomendasi lagi.</p>
8.	Apakah selama ini, UPT Monas melakukan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan lainnya ?	<p>Organisasi kemasyarakatan yang bekerjasama dengan UPT Monas adalah organisasi masyarakat yang bergerak di bidang permuseuman dan lembaga pendidikan. Karena keterbatasan wewenang UPT Monas yang hanya mengelola museum saja. Namun demikian cukup banyak organisasi kemasyarakatan yang datang ke UPT Monas untuk melaksanakan kegiatan kerjasama.</p>
9.	Bagaimana dengan pembangunan fisik yang dilakukan oleh	<p>Dalam aturan dijelaskan bahwa segala bentuk kegiatan harus</p>

	instansi terkait? Apakah mereka turut melaporkan kegiatan kepada UPT Monas ?	dilaporkan kepada Kantor pengelola monumen nasional, namun mengingat organisasi pengelola monas saat ini hanya berbentuk UPT maka kewenangan yang dimiliki oleh UPT Monas juga menjadi sangat terbatas. Artinya UPT Monas tidak berhak mencampuri pembangunan fisik yang dilakukan oleh dinas teknis lainnya. Namun terkadang dinas teknis yang akan melaksanakan kegiatan pembangunan fisik melaporkan kepada UPT Monas.
10.	Terkait dengan pembangunan fisik di kawasan monas, apakah UPT Monas terlibat ?	UPT Monas hanya melaksanakan pembangunan fisik internal tugu nasional (koleksi diorama dan fasilitas museum lainnya), sedangkan pembangunan fisik di luar tugu nasional merupakan kewenangan dari dinas teknis terkait.
11.	Dalam pembangunan kawasan medan merdeka yang dijadikan acuan adalah Keppres 25 Tahun 1995, apakah UPT Monas mengetahui keppres itu ?	Dalam menjalankan tugas pengelolaan, UPT Monas selalu mengacu pada aturan yang ditetapkan dalam Keppres, namun bila dilihat dari isi Keppres yang terkait dengan penataan ruang di kawasan medan merdeka, pihak UPT Monas tidak memiliki kewenangan untuk mendukung implementasi masterplan pembangunan fisik tersebut.
12.	Menurut Bapak, sejauhmana implementasi dari masterplan pembangunan fisik di kawasan medan merdeka ?	Pembangunan fisik di taman medan merdeka merupakan lokasi yang paling banyak dilakukan penataan ruang, dalam masterplan dijabarkan rencana pembangunan fisik yang sebagian sudah terlaksana namun masih banyak yang belum terlaksana. Mungkin baru sekitar 40% rencana yang sudah diimplementasikan.
13.	Sepengetahuan Bapak, bangunan fisik apa saja yang sudah dilaksanakan ? belum dilaksanakan dan tidak sesuai dengan masterplan?	Bangunan fisik yang sudah dilaksanakan, antara lain jalur pedestrian, landscape taman, air mancur joget, sarana perhubungan (kendaraan umum), penataan ruang bangunan kantor pemerintahan di sekitar taman monas. Sedangkan yang belum dilaksanakan, antara lain: parkir bawah

		<p>tanah, penampungan pedagang kaki lima, panggung budaya, dan lain-lain.</p> <p>Untuk yang tidak sesuai masterplan, antara lain: penempatan rusa di areal taman monas, pemasangan pagar tinggi yang mengelilingi taman monas, penampungan pedagang kaki lima di zone selatan, parkir kendaraan tamu balaikota DKI di ex IRTI, pom bensin, kantor pengelola parkir, dan lain-lain.</p>
14.	Bagaimana, solusi terbaik dalam upaya pemanfaatan taman monas?	<p>Dalam perspektif UPT Monas, saat ini pengunjung tugu monas banyak mengeluh lantaran jauhnya jarak dari lahan parkir monas (ex IRTI) menuju tugu monas (2 Km), sehingga bila hujan akan sangat menyulitkan pengunjung. Terlebih lagi sarana yang menuju ke tugu nasional tidak ada, selain harus jalan kaki, sehingga cenderung menimbulkan keluhan dari pengunjung.</p>

HASIL WAWANCARA

Narasumber : Wakil Walikota Jakarta Pusat

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Bagaimana latar belakang dan payung hukum keterlibatan Walikota Jakarta Pusat dalam pengelolaan kawasan monumen nasional?	<p>Monumen Nasional terletak di Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Walikota Jakarta Pusat adalah institusi perangkat kewilayahan yang bertugas mengelola administrasi wilayah. Mulai dari pelayanan kependudukan, kebersihan, pemberdayaan masyarakat hingga ketentraman dan ketertiban. Jadi secara kewilayahan kawasan monas masuk dalam</p>

		<p>tanggung jawab pengelolaan Walikotamadya Jakarta Pusat.</p> <p>Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 158 Tahun 2000 tentang Juklak pengelolaan dan pelestarian monumen nasional di Propinsi DKI Jakarta. Walikotamadya Jakarta Pusat adalah salah satu dari 12 unit yang termasuk dalam pengelolaan monumen nasional.</p>
2.	Bagaimana uraian tugas dari Walikotamadya Jakarta Pusat ?	<p>Walikotamadya Jakarta Pusat mempunyai tugas mengelola dan melestarikan monumen nasional dengan menangani ketertiban umum di areal taman medan merdeka. Dalam melaksanakan tugasnya Walikotamadya Jakarta Pusat melimpahkan kepada Suku Dinas Trantib dan Linmas dalam pelaksanaan penertiban wilayah sedangkan Walikotamadya menangani masalah kemasyarakatan di sekitar kawasan monumen nasional. Maksud dari kemasyarakatan adalah bagaimana cara Walikota untuk menanamkan rasa kebanggaan dan warga kota dalam upaya berpartisipasi dalam pengelolaan taman monas.</p>
3.	Sampai sejauh mana ruang lingkup kewenangan yang dimiliki oleh Walikotamadya Jakarta Pusat ?	<p>Walikotamadya hanya menangani masalah ketertiban di kawasan monas, dari ancaman para Penyandang Masalah Kerawanan Sosial (PMKS). Dalam melaksanakan tugasnya Walikotamadya Jakarta Pusat selalu berkoordinasi dengan aparat dari Dinas Trantib dan Linmas serta penanganan selanjutnya oleh Dinas Sosial.</p>
4.	Bagaimana koordinasi antar dinas teknis yang secara bersama-sama melaksanakan pengelolaan monumen nasional ?	<p>Pelaksanaan koordinasi diatur dalam Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 158 Tahun 2000 tentang Juklak pengelolaan dan pelestarian monumen nasional yang membagi bidang tugas sesuai dengan kapasitas dinas teknisnya. Selama ini koordinasi yang dilakukan oleh walikota antara lain dengan dinas trantib dan dinas sosial dalam pengelolaan ketertiban di kawasan monas. Sedangkan dinas lain jarang melakukan koordinasi dengan walikota dalam artian langsung berkaitan dengan masing-masing dinasny. Padahal secara operasional banyak pekerjaan dinas yang</p>

		dilaksanakan sudin dalam pengelolaan monas dan sudin berada di bawah walikota. Oleh karena itu mengingat Walikotamadya merupakan institusi pemerintahan wilayah yang langsung berada di bawah Gubernur sepatutnya Walikotamadya Jakarta Pusat diberikan kepercayaan untuk mengelola monas.
5.	Selain, alasan sebagai institusi pemerintahan yang langsung di bawah Gubernur, argumentasi apa yang bisa menjadi alasan utama mengapa Walikotamadya Jakarta Pusat seharusnya menjadi pengelola kawasan monas ?	Secara institusi/kelembagaan, Walikotamadya Jakarta Pusat memiliki kewenangan mengerahkan aparat di bawahnya secara operasional untuk melaksanakan penataan kawasan monas. Karena di Walikotamadya terdapat suku dinas dari dinas teknis yang dianggap mampu untuk melaksanakan penataan kawasan monas.
6.	Bagaimana intensitas koordinasi dengan dinas terkait dalam pengelolaan kawasan monas ?	Kegiatan koordinasi hanya dilaksanakan apabila ada kegiatan penting yang akan dilaksanakan di area taman monas. Artinya hanya sebatas urgenitas saja sedangkan secara regular belum dilaksanakan antar dinas terkait tersebut.
7.	Bagaimana peran dari Walikotamadya Jakarta Pusat dalam mengembangkan taman monas ?	Di Jakarta Pusat banyak perusahaan swasta yang ingin memberikan donasi kepada institusi pemerintah. Ini merupakan bentuk apresiasi terima kasih dari perusahaan. Walaupun pada akhirnya tetap mengedepankan nama perusahaannya. Namun indikasi ini apabila ditangani serius dapat membantu pembiayaan pembangunan di kawasan monas.
8.	Apakah selama ini, ada peraturan yang mengatur partisipasi swasta?	Menurut sepengetahuan saya, masalah partisipasi pihak lain belum diatur. Mungkin bisa ditanyakan kepada kantor pengelola monas akan masalah ini. Yang terpenting Walikota yakin dapat menggali sumber-sumber pembiayaan dari swasta.
9.	Terkait dengan pembangunan fisik di kawasan monas, apakah Walikotamadya Jakarta Pusat terlibat ?	Walikotamadya Jakarta Pusat tidak menangani langsung masalah pembangunan fisik, karena diserahkan kepada dinas atau sudin

		teknis terkait.
10.	Dalam pembangunan kawasan medan merdeka yang dijadikan acuan adalah Keppres 25 Tahun 1995, apakah Walikotamadya Jakarta Pusat mengetahui keppres itu ?	Sepengatahuan saya, peran Walikotamadya hanya masalah penanganan ketentraman dan ketertiban sedangkan masalah pembangunan fisik sebagaimana digariskan dalam keppres di luar kewenangan Walikotamadya Jakarta Pusat.
11.	Jadi, Walikotamadya Jakarta Pusat tidak memiliki masterplan penataan fisik di kawasan monas ?	Untuk masalah implementasi masterplan silahkan menanyakan langsung kepada Sudin Tata Kota Jakarta Pusat.
12.	Taman monas merupakan asset milik DKI sedangkan kawasan pemerintahan merupakan asset milik pemerintah pusat, bagaimana menyatukan hal tersebut ?	Seharusnya ada lembaga yang mengatur kawasan pemerintahan tersebut secara khusus sehingga memudahkan dalam penanganannya. Kalau taman monas jelas mudah karena sebagai asset milik Pem.Prov. DKI.
13.	Permasalahan apa yang timbul dalam pengelolaan asset milik pemerintah pusat?	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak bisa mengatur lembaga pemerintah pusat kecuali hanya tata ruang saja, salah satu contohnya adalah penanganan parkir kendaraan. Banyak kendaraan tamu atau karyawan dari departemen yang parkir di pinggir jalan padahal parkir taman monas masih mampu menampung kendaraan tersebut namun tidak dimanfaatkan.
12.	Strategi apa yang dianggap paling tepat dalam pengelolaan monas yang efektif dan efisien ?	Pengelolaan di bawah satu badan khusus atau diserahkan kepada Walikotamadya Jakarta Pusat agar rentang kendali dan koordinasi dapat lebih mudah dilaksanakan.

HASIL WAWANCARA

Narasumber : Kepala Seksi Sub Dinas Bina Program Dinas Sosial

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Bagaimana latar belakang dan payung hukum keterlibatan Dinas Sosial dalam pengelolaan kawasan monumen nasional?	Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 158 Tahun 2000 tentang Juklak pengelolaan dan pelestarian monumen nasional di Propinsi DKI Jakarta. Dinas Sosial adalah salah satu dari 12 unit yang termasuk dalam pengelolaan monumen nasional.
2.	Bagaimana uraian tugas dari Dinas sosial ?	Dinas Sosial mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan penertiban terhadap PMKS di areal taman medan merdeka. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Sosial bekerjasama dengan Dinas trantib dan linmas.
3.	Sampai sejauh mana ruang lingkup kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Sosial ?	Dinas sosial hanya menangani masalah ketertiban di kawasan monas, dari ancaman para Penyandang Masalah Kerawanan Sosial

		(PMKS). Hasil dari kegiatan penertiban dimasukkan ke Panti Kedoya untuk dididik dan dibina agar bias kembali ke kehidupan masyarakat normal.
4.	Bagaimana koordinasi antar dinas teknis yang secara bersama-sama melaksanakan pengelolaan monumen nasional ?	Koordinasi dilakukan ketika Dinas Trantib akan melaksanakan penertiban, namun sejak dilakukan pemagaran hampir tidak pernah dilakukan penertiban di kawasan taman monas.
5.	Bagaimana intensitas koordinasi dengan dinas terkait dalam pengelolaan kawasan monas ?	Kegiatan koordinasi hanya sebatas sosialisasi apabila ada kegiatan penting yang akan dilaksanakan sedangkan secara regular belum dilaksanakan antar dinas terkait tersebut.
6.	Bagaimana rencana dari Dinas Sosial dalam mengembangkan taman monas ?	Sekali lagi saya katakan bahwa Dinas sosial hanya menangani kegiatan hasil penertiban yang selanjutnya dibina di panti sosial kedoya.
7.	Terkait dengan pembangunan fisik di kawasan monas, apakah Dinas Sosial terlibat ?	Dinas sosial tidak terlibat dalam pembangunan fisik karena hal itu sudah ditangani oleh Dinas pertamanan atau dinas teknis lainnya.
8.	Dalam pembangunan kawasan medan merdeka yang dijadikan acuan adalah Keppres 25 Tahun 1995, apakah Dinas Sosial mengetahui keppres itu ?	Sepengatahuan saya, peran Dinas Sosial hanya masalah penanganan ketentraman dan ketertiban sedangkan masalah pembangunan fisik sebagaimana digariskan dalam keppres di luar kewenangan Dinas Sosial.
9.	Jadi, Dinas Sosial tidak memiliki masterplan penataan fisik di kawasan monas ?	Untuk masalah implementasi masterplan penataan fisik silahkan menanyakan langsung kepada dinas terkait.
10.	Strategi apa yang dianggap paling tepat dalam pengelolaan monas yang efektif dan efisien ?	Pengelolaan di bawah satu badan khusus dalam hal ini kantor pengelola monas.

11.	Pengelolaan monas hanya sebatas UPT, apakah dianggap cukup kapasitasnya untuk mengelola kawasan monas?	Seharusnya bentuk organisasinya jangan UPT tetapi alangkah lebih baik dalam bentuk badan atau kantor sehingga memiliki kewenangan lebih besar, tidak sebatas pada UPT yang hanya menangani masalah teknis saja.
-----	--	---

HASIL WAWANCARA

Narasumber : Kepala Seksi di Dinas Kebersihan

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Bagaimana latar belakang dan payung hukum keterlibatan Dinas Kebersihan dalam pengelolaan kawasan monumen nasional?	Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 158 Tahun 2000 tentang Juklak pengelolaan dan pelestarian monumen nasional di Propinsi DKI Jakarta. Dinas Kebersihan adalah salah satu dari 12 unit yang termasuk dalam pengelolaan monumen nasional.
2.	Bagaimana uraian tugas dari Dinas kebersihan?	Dalam juklak, Dinas kebersihan mempunyai tugas pengangkutan sampah dari lokasi penampungan sementara di areal taman medan merdeka ke lokasi pembuangan akhir di bantar gebang. Namun dalam implementasinya Dinas Kebersihan ada kegiatan lain, seperti penyapuan jalan, penempatan toilet berjalan di taman monas, penempatan tong-tong sampah dan lain sebagainya.
3.	Sampai sejauh mana ruang lingkup kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Kebersihan ?	Dinas kebersihan hanya menangani masalah kebersihan di kawasan monas, tidak mencakup di dalam area tugu monas.

4.	Bagaimana koordinasi antar dinas teknis yang secara bersama-sama melaksanakan pengelolaan monumen nasional ?	Terdapat tumpang tindih pekerjaan dalam penanganan sampah, misalnya UPT monas memiliki pengelola sampah sendiri (kerjasama dengan swasta), dinas pertamanan juga mengelola sampah sendiri. Padahal seharusnya dinas pertamanan dan UPT monas dapat memberdayakan dinas kebersihan dalam pengelolaan sampah di kawasan monas.
5.	Jadi, seharusnya pengelolaan sampah berada dalam kewenangan Dinas kebersihan saja?	Betul, mengingat pengelolaan sampah merupakan kewenangan dari dinas kebersihan, dan kami memiliki sarana untuk penanganan sampah tersebut, mulai dari kendaraan hingga LPA.
6.	Bagaimana intensitas koordinasi dengan dinas terkait dalam pengelolaan kawasan monas ?	Kegiatan koordinasi hanya sebatas apabila ada kegiatan penting yang akan dilaksanakan sedangkan secara regular belum dilaksanakan antar dinas terkait tersebut.
7.	Bagaimana rencana dari Dinas Kebersihan dalam mengembangkan taman monas ?	Dinas Kebersihan rencananya akan memperbaiki lokasi penampungan sampah sementara dan penempatan tong sampah serta menambah jumlah toilet yang dikeluhkan pengunjung karena jumlahnya sangat sedikit.
7.	Terkait dengan pembangunan fisik di kawasan monas, apakah Dinas Kebersihan terlibat ?	Dinas kebersihan tidak terlibat dalam pembangunan fisik karena hal itu sudah ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum atau dinas teknis lainnya.
8.	Dalam pembangunan kawasan medan merdeka yang dijadikan acuan adalah Keppres 25 Tahun 1995, apakah Dinas Kebersihan mengetahui keppres itu ?	Sepengetahuan saya, peran Dinas Kebersihan hanya masalah penanganan kebersihan sedangkan masalah pembangunan fisik sebagaimana digariskan dalam keppres di luar kewenangan Dinas kebersihan.
9.	Jadi, Dinas Kebersihan tidak memiliki masterplan penataan fisik	Untuk masalah implementasi masterplan penataan fisik silahkan

	di kawasan monas ?	menanyakan langsung kepada dinas terkait.
10.	Strategi apa yang dianggap paling tepat dalam pengelolaan monas yang efektif dan efisien ?	Pembuatan aturan dan kebijakan yang jelas sehingga bisa meminimalisir tumpang tindihnya pekerjaan. Peningkatan pengawasan sehingga lebih efektif sedangkan koordinasi harus dilaksanakan secara regular untuk penanganan masalah dan perencanaan yang akan dilaksanakan.

HASIL WAWANCARA

Narasumber : Wakil Kepala Dinas Pariwisata Daerah

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Bagaimana latar belakang dan payung hukum keterlibatan Dinas Pariwisata dalam pengelolaan kawasan monumen nasional?	Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 158 Tahun 2000 tentang Juklak pengelolaan dan pelestarian monumen nasional di Propinsi DKI Jakarta. Dinas Pariwisata Daerah adalah salah satu dari 12 unit yang termasuk dalam pengelolaan monumen nasional.
2.	Bagaimana uraian tugas dari Dinas Pariwisata?	Dalam juklak, Dinas kebersihan mempunyai tugas penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kepariwisataan dalam upaya meningkatkan jumlah arus wisatawan ke monument nasional
3.	Sampai sejauh mana ruang lingkup kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata ?	Melakukan promosi mengenai kawasan monumen nasional dan menetapkannya menjadi Daerah Tujuan Wisata di Kota Jakarta.
4.	Bagaimana arus wisatawan yang menuju monas ?	Umumnya mereka sangat kagum akan keberadaan tugu nasional karena memiliki bangunan unik yang merupakan landmark kota Jakarta bahkan Indonesia. Saat ini kunjungan wisatawan menuju tugu monas sedikit khususnya wisatawan lokal, mungkin disebabkan wisata sejarah kurang populer di kalangan masyarakat Indonesia.

5.	Bagaimana Dinas pariwisata melakukan ekstensifikasi wisatawan agar berkunjung ke monas?	Kegiatan promosi umumnya dilaksanakan di daerah (luar kota Jakarta) dan luar negeri. Kami selalu menyelipkan monas sebagai salah satu daerah tujuan wisata yang kami tawarkan apabila berkunjung ke Indonesia.
6.	Apakah Dinas pariwisata pernah melakukan penelitian terhadap wisatawan yang berkunjung ke monas?	Pernah, wisatawan yang berkunjung ke monas umumnya berasal dari luar daerah kota Jakarta, sedangkan wisatawan manca negara tidak menjadikan monas prioritas utama kunjungannya karena mereka lebih memilih Bali. Sedangkan di Jakarta sendiri pengunjung monas berasal dari siswa SD, SMP sebagai bagian dari pelajaran di sekolah.
7.	Apa alasan utama, mengapa monas tidak menjadi prioritas utama dalam kepariwisataan di Indonesia?	Pada dasarnya monas bukan diperuntukkan sebagai tempat pariwisata melainkan sebagai landmark kota yang karena keunikannya diminati oleh wisatawan. Namun daya dukung monas sebagai sarana pariwisata ditinjau dari fasilitas sangat tidak memadai.
8.	Fasilitas apa saja yang perlu diimplementasikan di monas, apabila ingin menjadi sarana pariwisata?	Hal pertama adalah fasilitas hiburan yang menarik perhatian pengunjung seperti panggung budaya, café/restorant, kios merchandise, sarana kebersihan (toilet umum), sarana pengangkutan dari lokasi parkir menuju tugu monas karena umumnya pengunjung mengeluh jarak dari lokasi parkir menuju tugu monas sangat jauh sedangkan kendaraan tidak boleh masuk ke areal taman monas.
9.	Terkait dengan pembangunan fisik di kawasan monas, apakah Dinas Pariwisata terlibat ?	Dinas pariwisata tidak terlibat dalam pembangunan fisik karena hal itu sudah ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum atau dinas teknis lainnya.

10.	Dalam pembangunan kawasan medan merdeka yang dijadikan acuan adalah Keppres 25 Tahun 1995, apakah Dinas pariwisata mengetahui keppres itu ?	Dinas pariwisata hanya penanganan kepariwisataan saja sedangkan masalah pembangunan fisik sebagaimana digariskan dalam keppres di luar kewenangan Dinas pariwisata.
11.	Apakah Dinas pariwisata memiliki masterplan penataan fisik di kawasan monas ?	Iya, Dinas pariwisata memiliki dan mengetahui masterplan fisik karena erat kaitannya dengan sarana pendukung kepariwisataan. Namun untuk masalah implementasi masterplan penataan fisik silahkan menanyakan langsung kepada dinas terkait.
12.	Bagaimana koordinasi antar dinas teknis yang secara bersama-sama melaksanakan pengelolaan monumen nasional ?	Terdapat tumpang tindih pekerjaan dalam kegiatan promosi, misalnya UPT monas memiliki seksi promosi sendiri (kerjasama dengan swasta), Biro humas juga melakukan promosi monas. Padahal seharusnya biro humas dan UPT monas dapat memberdayakan dinas pariwisata dalam promosi di kawasan monas.
13.	Bagaimana intensitas koordinasi dengan dinas terkait dalam pengelolaan kawasan monas ?	Kegiatan koordinasi hanya sebatas apabila ada kegiatan penting yang akan dilaksanakan sedangkan secara regular belum dilaksanakan antar dinas terkait tersebut.
14.	Strategi apa yang dianggap paling tepat dalam pengelolaan monas yang efektif dan efisien ?	Pembuatan aturan dan kebijakan yang jelas sehingga bisa meminimalisir tumpang tindihnya pekerjaan. Peningkatan pengawasan sehingga lebih efektif sedangkan koordinasi harus dilaksanakan secara regular untuk penanganan masalah dan perencanaan yang akan dilaksanakan.

HASIL WAWANCARA

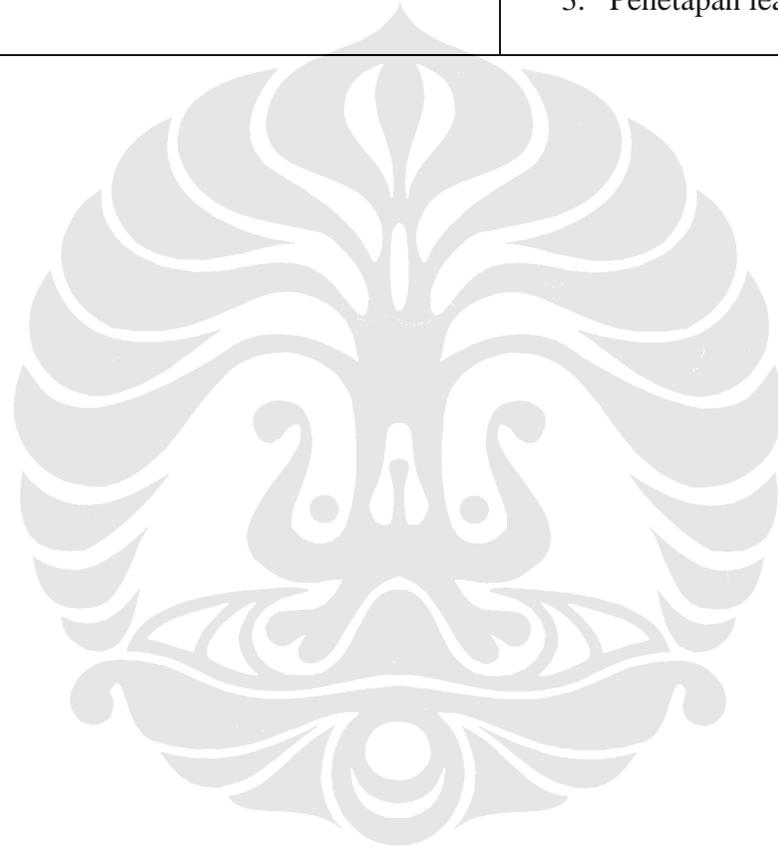
Narasumber : Kepala Seksi di Sub Dinas Bina Program Dinas PU

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Bagaimana latar belakang dan payung hukum keterlibatan Dinas PU dalam pengelolaan kawasan monumen nasional?	Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 158 Tahun 2000 tentang Juklak pengelolaan dan pelestarian monumen nasional di Propinsi DKI Jakarta. Dinas Pekerjaan Umum adalah salah satu dari 12 unit yang termasuk dalam pengelolaan monumen nasional. Namun saat ini Dinas Pekerjaan Umum terbagi menjadi 2 (dua) suku dinas, yakni Suku Dinas Pekerjaan Umum Jalan dan Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air.
2.	Bagaimana uraian tugas dari Dinas Pekerjaan Umum?	Dalam juklak, Dinas PU mempunyai tugas penyusunan perencanaan teknis dan pelaksanaan proyek pembangunan jalan silang monumen nasional beserta kelengkapannya seperti trotoar dan saluran, perkerasan parkir, struktur bawah tanah / terowongan dan lain-lain yang berhubungan dengan pekerjaan sipil.
3.	Terkait dengan pembangunan fisik di kawasan monas, sejauh mana keterkaitan Dinas PU dengan keseluruhan pembangunan fisik yang dilaksanakan?	Berawal dari perencanaan dengan tetap mengacu kepada masterplan, kemudian diimplementasikan pembangunannya. Dinas PU lebih berorientasi kepada pembangunan fisik jalan, trotoar dan saluran.
4.	Dalam pembangunan kawasan medan merdeka yang dijadikan acuan adalah Keppres 25 Tahun 1995, apakah Dinas PU mengetahui keppres itu ?	Setiap pekerjaan yang dilakukan oleh Dinas PU selalu berpedoman kepada masterplan sebagaimana dituangkan dalam Keppres 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Medeka. Namun terkadang ada penyesuaian-penyesuaian di lapangan.

5.	Faktor apa saja yang mempengaruhi penyesuaian terhadap masterplan penataan fisik di kawasan monas ?	<p>Ada 2 faktor yang utama :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor kepemimpinan, dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta yang membuat kebijakan-kebijakan khusus dalam penataan fisik kawasan monas. 2. Faktor kebutuhan warga kota akan sarana prasarana yang dibutuhkan.
6.	Menurut Bapak, bangunan fisik apa saja yang merupakan hasil penyesuaian ?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pagar yang mengelilingi taman monas setinggi 3,2 M merupakan salah satu yang pembangunan fisik yang tidak terdapat dalam masterplan namun tetap dilaksanakan pembangunannya mengingat adanya kebijaksanaan dari pimpinan. 2. Parkir di ex IRTI, awalnya merupakan lahan parkir sementara mengingat pembangunan parkir bawah tanah belum direalisasikan serta memenuhi kebutuhan parkir kendaraan pegawai dan tamu balai kota DKI. Namun hingga kini lahan parkir tersebut tetap eksis padahal peruntukkannya adalah taman yang ditanami pepohonan besar sebagai pelindung tugu monas. Dll 3. Penampungan K5, seharusnya pedagang K5 ditata pada beberapa area di taman monas dan bawah tanah, namun saat ini ditempatkan di sisi selatan taman monas.
7.	Apakah, selamanya bangunan fisik yang tidak sesuai akan tetap dibiarkan?	Seharusnya mulai saat ini, pihak Bapeda selaku perencana kota sudah harus memikirkan kelanjutan pembangunan fisik pembangunan taman medan merdeka, mengingat fungsi utama dari taman monas sebagai civic center belum didapat.
8.	Pembangunan fisik apa saja yang belum direalisasikan?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panggung cagar budaya, sebagai sarana seniman unjuk kebolehan sehingga dari sisi budaya, taman monas dapat terwakili. 2. Parkir bawah tanah, diharapkan dapat menampung seluruh kendaraan karyawan atau tamu kantor pemerintahan yang

		<p>ada di kawasan monas.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Lokasi Pedagang K5, agar terlihat lebih tertib dan bersih serta dimanfaatkan oleh para karyawan yang ada di kawasan civic centre. 4. Terowongan sub way yang masih menjadi wacana hingga saat ini.
9.	Bagaimana koordinasi antar dinas teknis yang secara bersama-sama melaksanakan pengelolaan monumen nasional ?	Adanya indikasi duplikasi pekerjaan. Seharusnya segala pembangunan fisik yang bersifat sipil harus dikerjakan oleh Dinas PU, namun ada beberapa kegiatan yang seharusnya milik Dinas PU dikerjakan oleh Dinas lainnya. Misalnya pemasangan pagar yang merupakan pekerjaan sipil dikerjakan oleh Dinas Pertamanan, demikian halnya perbaikan pedestrian juga dilakukan oleh Dinas Pertamanan. Artinya terdapat inkonsistensi antara juklak dan pelaksanaan di lapangan.
10.	Bagaimana intensitas koordinasi dengan dinas terkait dalam pengelolaan kawasan monas ?	<p>Pada awal tahun 1995 dan sesuai Instruksi Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 1995 tentang pelaksanaan koordinasi pengelolaan taman medan merdeka, seluruh rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dilaporkan kepada Kepala Kantor Pengelola Monas selaku coordinator. Namun seiring dengan pengalihan tugas dari kantor pengelola menjadi UPT Dinas Kebudayaan maka peran koordinator dirasakan hilang, artinya tidak ada lagi leading sector dalam pengelolaan monas.</p> <p>Kegiatan koordinasi hanya sebatas apabila ada kegiatan pembangunan fisik yang akan dilaksanakan sedangkan secara regular jarang dilaksanakan antar dinas terkait tersebut.</p>

11.	Strategi apa yang dianggap paling tepat dalam pengelolaan monas yang efektif dan efisien ?	<ol style="list-style-type: none">1. Pembuatan aturan dan kebijakan yang jelas sehingga bisa meminimalisir tumpang tindihnya pekerjaan.2. Koordinasi harus dilaksanakan secara regular untuk penanganan masalah dan perencanaan yang akan dilaksanakan.3. Penetapan leading sector dalam pengelolaan taman monas.
-----	--	---



HASIL WAWANCARA

Narasumber : Kepala Seksi Peremajaan Kota Sub Dinas PrPRK Tata Kota

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Bagaimana latar belakang dan payung hukum keterlibatan Dinas Tata Kota dalam pengelolaan kawasan monumen nasional?	Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 158 Tahun 2000 tentang Juklak pengelolaan dan pelestarian monumen nasional di Propinsi DKI Jakarta. Dinas Tata Kota adalah salah satu dari 12 unit yang termasuk dalam pengelolaan monumen nasional.
2.	Bagaimana uraian tugas dari Dinas Tata Kota?	Dalam juklak, Dinas Tata Kota mempunyai tugas penyusunan perencanaan tata ruang taman medan merdeka yang menunjang terhadap keberadaan dan citra tugu nasional.
3.	Terkait dengan pembangunan fisik di kawasan monas, sejauh mana keterkaitan Dinas Tata Kota dengan keseluruhan pembangunan fisik yang dilaksanakan?	Dinas Tata Kota menyusun perencanaan dengan tetap mengacu kepada masterplan, kemudian menyerahkan rencana tersebut ke bapeda untuk selanjutnya dilaksanakan pembangunan fisik oleh Dinas terkait. Perencanaan yang dilaksanakan oleh Dinas Tata Kota dianggap sudah selesai mengingat sudah diterbitkannya Panduan Rancang Kota sebagai terjemahan dari masterplan.
4.	Dalam pembangunan kawasan medan merdeka yang dijadikan acuan adalah Keppres 25 Tahun 1995, apakah Dinas Tata Kota mengetahui keppres itu ?	Dinas Tata Kota adalah salah satu perencana yang membidani diterbitkannya Keppres 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Medeka.
5.	Sejauhmana ruang lingkup Dinas Tata Kota dalam pengelolaan kawasan monas?	Dinas Tata Kota telah menyusun RTRW yang mengatur peruntukkan kawasan monas. Dalam RTRW ditetapkan bahwa bangunan yang berada di kawasan monas harus berupa karya pemerintahan, fasilitas umum dan ruang terbuka hijau.
6.	Menurut Bapak, Bagaimana implementasi dari RTRW? Mengingat saat ini banyak ditemukan perubahan peruntukkan?	Sebagai kawasan ekonomi prospektif dan jantung kota Jakarta perubahan peruntukkan memang kerap terjadi mengingat minat swasta untuk berkantor di kawasan tersebut sangat tinggi. Bukan

		hanya kantor, ancaman selanjutnya adalah tempat usaha seperti restoran, bank, lembaga pendidikan swasta dan lain-lain. Namun demikian Dinas Tata Kota tetap menggarisbawahi bahwa peruntukkan di kawasan monas hanya untuk karya pemerintahan.
7.	Apakah, selamanya bangunan fisik yang tidak sesuai akan tetap dibiarkan?	Untuk menangani masalah perubahan peruntukkan Dinas Tata Kota bekerjasama dengan Dinas P2B untuk melaksanakan penertiban bangunan yang tidak sesuai peruntukkan, salah satu contoh adalah pelarangan Humpuss Group untuk berkantor di jalan medan merdeka hingga akhirnya dilakukan penertiban.
8.	Apakah masih ada kantor swasta, atau bangunan lainnya yang tidak sesuai peruntukkan ? karena berdasarkan observasi yang saya lakukan masih ditemukan.	Betul bahwa masih ditemukan bangunan yang tidak sesuai seperti bank swasta, hotel swasta, restoran, kantor swasta. Namun beberapa bangunan tersebut sudah ada sejak dikeluarkannya RTRW penetapan kawasan monas, jadi berdasarkan sejarah bangunan tersebut sudah ada sejak dulu kala. Sehingga mungkin salah pada penetapan pada waktu lampau.
9.	Bagaimana dengan PT. Indosat yang saat ini bukan merupakan BUMN tetapi sudah murni milik swasta?	Memang diakui kelemahan dari RTRW yang belum mengatur masalah ini, karena memang berdasarkan aturan bangunan tersebut tidak boleh digunakan oleh swasta namun karena perubahan ini baru terjadi akhir-akhir ini sehingga tidak mampu diakomodasi oleh aturan mengenai peruntukkan.
10.	Apabila PT. Indosat terus didiamkan, bagaimana dengan BUMN lain yang juga berkantor di kawasan monas apabila mereka juga mengalami privatisasi?	Berdasarkan aturan memang harus dipindahkan, terlebih tanah yang berada di kawasan monas keseluruhannya merupakan tanah negara sehingga bukan bagian dari asset mereka yang masuk dalam penyerahan kepemilikan kepada swasta. Langkah selanjutnya adalah perubahan pengelolaan tanah oleh pihak swasta tersebut menjadi Hak Pengelolaan (HPL) di atas tanah Negara yang tentunya akan menguntungkan pemerintah.

11.	Bagaimana dengan penataan taman medan merdeka sebagai civic centre?	Pembangunan taman medan merdeka dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam masterplan, pada awalnya masterplan diperkirakan akan selesai direalisasikan pada tahun 2010 namun hingga saat ini mungkin baru 40% yang selesai. Kegiatan pembangunan fisik seluruhnya diserahkan kepada dinas terkait.
12.	Bagaimana koordinasi antar dinas teknis yang secara bersama-sama melaksanakan pengelolaan monumen nasional ?	Koordinasi dilakukan dengan cara melakukan rapat koordinasi untuk membahas masalah pembangunan di kawasan medan merdeka. Namun intensitas rapat koordinasi saat ini sangat jarang tidak seperti pada tahun 1995 awal penjabaran masterplan.
13.	Bagaimana intensitas koordinasi dengan dinas terkait dalam pengelolaan kawasan monas ?	<p>Pada awal tahun 1995 dan sesuai Instruksi Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 1995 tentang pelaksanaan koordinasi pengelolaan taman medan merdeka, seluruh rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dilaporkan kepada Kepala Kantor Pengelola Monas selaku coordinator. Namun seiring dengan pengalihan tugas dari kantor pengelola menjadi UPT Dinas Kebudayaan maka peran koordinator dirasakan hilang, artinya tidak ada lagi leading sector dalam pengelolaan monas.</p> <p>Seharusnya setiap pembangunan fisik yang dilaksanakan oleh dinas terkait mengacu pada masterplan. Oleh karena itu dinas teknis yang akan melaksanakan pekerjaan fisik pembangunan taman medan merdeka harus melaporkan kepada Dinas Tata Kota, namun pelaporannya hampir dikatakan tidak pernah. Sehingga Dinas Tata Kota tidak bisa melakukan pengendalian terhadap jalannya pembangunan fisik di kawasan medan merdeka.</p>
14.	Menurut Bapak, bangunan fisik apa saja yang tidak sesuai masterplan?	1. Pagar yang mengelilingi taman monas setinggi 3,2 M merupakan salah satu yang pembangunan fisik yang tidak terdapat dalam masterplan namun tetap dilaksanakan

		<p>pembangunannya mengingat adanya kebijaksanaan dari pimpinan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Parkir di ex IRTI, awalnya merupakan lahan parkir sementara mengingat pembangunan parkir bawah tanah belum direalisasikan serta memenuhi kebutuhan parkir kendaraan pegawai dan tamu balaikota DKI. Namun hingga kini lahan parkir tersebut tetap eksis padahal peruntukkannya adalah taman yang ditanami pepohonan besar sebagai pelindung tugu monas. Dll 3. Penampungan K5, seharusnya pedagang K5 ditata pada beberapa area di taman monas dan bawah tanah, namun saat ini ditempatkan di sisi selatan taman monas.
15.	Menurut Bapak, bangunan fisik apa saja yang belum direalisasikan?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panggung cagar budaya, sebagai sarana seniman unjuk kebolehan sehingga dari sisi budaya, taman monas dapat terwakili. 2. Parkir bawah tanah, diharapkan dapat menampung seluruh kendaraan karyawan atau tamu kantor pemerintahan yang ada di kawasan monas. 3. Lokasi Pedagang K5, agar terlihat lebih tertib dan bersih serta dimanfaatkan oleh para karyawan yang ada di kawasan civic centre. 4. Terowongan sub way yang masih menjadi wacana hingga saat ini.
16.	Saat ini, banyak instansi yang mengeluhkan besarnya biaya mewujudkan bangunan fisik seperti digariskan dalam masterplan, bagaimana menyikapi kondisi seperti ini?	Dalam keppres, dinyatakan bahwa pembiayaan dapat berasal dari APBN, APBD dan sumber lain yang sah. Artinya terdapat peluang adanya dana bantuan dari pemerintah pusat dan swasta untuk melaksanakan pembangunan.
17.	Sejalan dengan semangat otonomi daerah, pemerintah pusat cenderung enggan untuk ikut serta lagi dalam pengelolaan taman monas khususnya dalam segi dana, karena taman monas	Permasalahan inilah yang seharusnya dikaji mengingat taman dan tugu monas bukan hanya landmark kota Jakarta tetapi juga Indonesia dan taman monas merupakan alun-alun istana yang

	merupakan asset milik Pem. Prov. DKI Jakarta?	mencerminkan citra dari Negara Indonesia. Oleh karena itu perlu dilakukan kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
18.	Strategi apa yang dianggap paling tepat dalam pengelolaan monas yang efektif dan efisien ?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisi Keppres dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan monas. 2. Koordinasi harus dilaksanakan secara regular untuk penanganan masalah dan perencanaan yang akan dilaksanakan. 3. Penetapan leading sector dalam pengelolaan taman monas. 4. Menciptakan magnet baru yang bertujuan untuk menghadirkan warga kota datang ke monas.

HASIL WAWANCARA

Narasumber : Kepala Seksi Sub Dinas Taman Dinas Pertamanan

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Bagaimana latar belakang dan payung hukum keterlibatan Dinas Pertamanan dalam pengelolaan kawasan monumen nasional?	Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 158 Tahun 2000 tentang Juklak pengelolaan dan pelestarian monumen nasional di Propinsi DKI Jakarta. Dinas Pertamanan adalah salah satu dari 12 unit yang termasuk dalam pengelolaan monumen nasional. Selain itu dari awal kondisi eksisting taman monas berbentuk taman kota sehingga merupakan kapasitas Dinas pertamanan untuk

		mengelolanya.
2.	Bagaimana uraian tugas dari Dinas Pertamanan?	Dalam juklak, Dinas Pertamanan mempunyai tugas penyusunan perencanaan teknis dan pelaksanaan proyek pembangunan taman monumen nasional.
3.	Terkait dengan pembangunan fisik di kawasan monas, sejauh mana keterkaitan Dinas Pertamanan dengan keseluruhan pembangunan fisik yang dilaksanakan?	Berawal dari perencanaan dengan tetap mengacu kepada masterplan, kemudian diimplementasikan pembangunannya. Dinas Pertamanan awalnya lebih berorientasi kepada pembangunan fisik landscape taman, pemilihan jenis tanaman dan pemeliharaan tanaman. Namun tidak tertutup kemungkinan Dinas Pertamanan melaksanakan pembangunan fisik lainnya yang diperintahkan oleh Gubernur.
4.	Dalam pembangunan kawasan medan merdeka yang dijadikan acuan adalah Keppres 25 Tahun 1995, apakah Dinas Pertamanan mengetahui keppres itu ?	Setiap pekerjaan yang dilakukan oleh Dinas Pertamanan selalu berpedoman kepada masterplan sebagaimana dituangkan dalam Keppres 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Medeka. Namun terkadang ada penyesuaian-penyesuaian di lapangan.
5.	Faktor apa saja yang mempengaruhi penyesuaian terhadap masterplan penataan fisik di kawasan monas ?	Ada 2 faktor yang utama : <ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor kepemimpinan, dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta yang membuat kebijakan-kebijakan khusus dalam penataan fisik kawasan monas. 2. Faktor kebutuhan warga kota akan sarana prasarana yang dibutuhkan.
6.	Menurut Bapak, bangunan fisik apa saja yang merupakan hasil penyesuaian ?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pagar yang mengelilingi taman monas setinggi 3,2 M merupakan salah satu yang pembangunan fisik yang tidak terdapat dalam masterplan namun tetap dilaksanakan pembangunannya mengingat adanya kebijaksanaan dari

		<p>pimpinan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Parkir di ex IRTI, awalnya merupakan lahan parkir sementara mengingat pembangunan parkir bawah tanah belum direalisasikan serta memenuhi kebutuhan parkir kendaraan pegawai dan tamu balaikota DKI. Namun hingga kini lahan parkir tersebut tetap eksis padahal peruntukannya adalah taman yang ditanami pepohonan besar sebagai pelindung tugu monas. Dll 3. Penampungan K5, seharusnya pedagang K5 ditata pada beberapa area di taman monas dan bawah tanah, namun saat ini ditempatkan di sisi selatan taman monas.
7.	Apakah, selamanya bangunan fisik yang tidak sesuai akan tetap dibiarkan?	Seharusnya mulai saat ini, pihak Bapeda selaku perencana kota sudah harus memikirkan kelanjutan pembangunan fisik pembangunan taman medan merdeka, mengingat fungsi utama dari taman monas sebagai civic center belum didapat.
8.	Pembangunan fisik apa saja yang belum direalisasikan?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panggung cagar budaya, sebagai sarana seniman unjuk kebolehan sehingga dari sisi budaya, taman monas dapat terwakili. 2. Parkir bawah tanah, diharapkan dapat menampung seluruh kendaraan karyawan atau tamu kantor pemerintahan yang ada di kawasan monas. 3. Lokasi Pedagang K5, agar terlihat lebih tertib dan bersih serta dimanfaatkan oleh para karyawan yang ada di kawasan civic centre. 4. Terowongan sub way yang masih menjadi wacana hingga saat ini.
9.	Bagaimana koordinasi antar dinas teknis yang secara bersama-sama melaksanakan pengelolaan monumen nasional ?	Pembangunan fisik yang dilaksanakan oleh Dinas pertamanan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Apabila masyarakat membutuhkan sarana olahraga seperti lapangan futsal, maka Dinas Pertamanan akan membangun lapangan futsal sedangkan

		<p>pengelolannya diserahkan kepada dinas olahraga. Jadi setiap pembangunan fisik yang dilakukan oleh Dinas Pertamanan selanjutnya akan diserahkan kepada dinas teknis terkait.</p>
10.	<p>Bagaimana intensitas koordinasi dengan dinas terkait dalam pengelolaan kawasan monas ?</p>	<p>Pada awal tahun 1995 dan sesuai Instruksi Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 1995 tentang pelaksanaan koordinasi pengelolaan taman medan merdeka, seluruh rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dilaporkan kepada Kepala Kantor Pengelola Monas selaku koordinator. Namun seiring dengan pengalihan tugas dari kantor pengelola menjadi UPT Dinas Kebudayaan maka peran koordinator dirasakan hilang, artinya tidak ada lagi leading sector dalam pengelolaan monas.</p> <p>Namun karena Dinas Pertamanan memiliki lahan terluas di taman monas, maka sepatutnya Dinas Pertamanan menjadi leading sector sehingga perencanaan akan menjadi padu dan memudahkan koordinasi.</p> <p>Karena pada saat ini, kegiatan koordinasi hanya sebatas apabila ada kegiatan pembangunan fisik yang akan dilaksanakan sedangkan secara regular jarang dilaksanakan antar dinas terkait tersebut.</p>
11.	<p>Strategi apa yang dianggap paling tepat dalam pengelolaan monas yang efektif dan efisien ?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisi Keppres dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan monas. 2. Koordinasi harus dilaksanakan secara regular untuk penanganan masalah dan perencanaan yang akan dilaksanakan. 3. Penetapan leading sector dalam pengelolaan taman monas. 4. Menciptakan magnet baru yang bertujuan untuk menghadirkan warga kota datang ke monas.

HASIL WAWANCARA

Narasumber : Kepala Seksi di Sub Dinas Bina Program Dinas PJU/SJU

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Bagaimana latar belakang dan payung hukum keterlibatan Dinas PJU/SJU dalam pengelolaan kawasan monumen nasional?	Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 158 Tahun 2000 tentang Juklak pengelolaan dan pelestarian monumen nasional di Propinsi DKI Jakarta. Dinas PJU/SJU adalah salah satu dari 12 unit yang termasuk dalam pengelolaan monumen nasional.
2.	Bagaimana uraian tugas dari Dinas PJU/SJU?	Dalam juklak, Dinas PJU/SJU mempunyai tugas penyusunan perencanaan dan pelaksanaan penataan proyek pembangunan lampu penerangan taman medan merdeka, jalan silang monas, lampu sorot penerangan luar tugu nasional dan energi untuk fasilitas air mancur akustik.
3.	Terkait dengan pembangunan fisik di kawasan monas, sejauh	Pembangunan fisik lampu penerangan dilaksanakan apabila ada

	mana keterkaitan Dinas PJU/SJU dengan keseluruhan pembangunan fisik yang dilaksanakan?	bangunan fisik di area taman monas yang membutuhkan lampu penerangan, atau energi listrik, seperti air mancur joget yang membutuhkan energi untuk pancurannya, dan lain-lain.
4.	Dalam pembangunan kawasan medan merdeka yang dijadikan acuan adalah Keppres 25 Tahun 1995, apakah Dinas PJU/SJU mengetahui keppres itu ?	Setiap pekerjaan yang dilakukan oleh Dinas PJU/SJU merupakan kelanjutan dari pembangunan fisik yang dilakukan oleh Dinas teknis lainnya jadi secara pembangunan keseluruhan Dinas PJU/SJU kurang mengetahuinya.
5.	Bagaimana koordinasi antar dinas teknis yang secara bersama-sama melaksanakan pengelolaan monumen nasional ?	Kegiatan koordinasi hanya sebatas apabila ada kegiatan penting yang akan dilaksanakan sedangkan secara regular belum dilaksanakan antar dinas terkait tersebut.
6.	Dalam pembangunan kawasan medan merdeka yang dijadikan acuan adalah Keppres 25 Tahun 1995, apakah Dinas PJU/SJU mengetahui keppres itu ?	Sepengetahuan saya, peran Dinas PJU/SJU hanya masalah penanganan penerangan taman dan tugu monas sedangkan masalah pembangunan fisik sebagaimana digariskan dalam keppres di luar kewenangan Dinas PJU/SJU.
9.	Jadi, Dinas PJU/SJU tidak memiliki masterplan penataan fisik di kawasan monas ?	Untuk masalah implementasi masterplan penataan fisik silahkan menanyakan langsung kepada dinas terkait.
10.	Strategi apa yang dianggap paling tepat dalam pengelolaan monas yang efektif dan efisien ?	Perbaikan koordinasi, dengan penetapan aturan atau petunjuk pelaksanaan yang jelas artinya jangan sampai pembangunan fisik dilaksanakan oleh dua dinas secara bersama-sama pada lahan yang sama.

HASIL WAWANCARA

Narasumber : Kepala Seksi Pemeliharaan Kantor Tata Bangunan dan Gedung Pemda

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Bagaimana latar belakang dan payung hukum keterlibatan KTBG dalam pengelolaan kawasan monumen nasional?	Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 158 Tahun 2000 tentang Juklak pengelolaan dan pelestarian monumen nasional di Propinsi DKI Jakarta. KTBG adalah salah satu dari 12 unit yang termasuk dalam pengelolaan monumen nasional.
2.	Bagaimana uraian tugas dari KTBG?	Dalam juklak, KTBG mempunyai tugas penyusunan perencanaan teknis pengembangan tugu nasional.
3.	Terkait dengan pembangunan fisik di kawasan monas, sejauh mana keterkaitan KTBG dengan keseluruhan pembangunan fisik yang dilaksanakan?	Pembangunan fisik yang menjadi tugas dari KTBG hanya berkisar pada pengembangan tugu nasional dan terowongan sebagai pintu masuk tugu nasional.
4.	Dalam pembangunan kawasan medan merdeka yang dijadikan acuan adalah Keppres 25 Tahun 1995, apakah KTBG mengetahui keppres itu ?	KTBG saat ini hanya bersifat pemeliharaan mengingat ekstensifikasi tugu nasional sulit dikembangkan.

5.	Bagaimana koordinasi antar dinas teknis yang secara bersama-sama melaksanakan pengelolaan monumen nasional ?	Kegiatan koordinasi hanya sebatas apabila ada kegiatan penting yang akan dilaksanakan sedangkan secara regular belum dilaksanakan antar dinas terkait tersebut.
6.	Dalam pembangunan kawasan medan merdeka yang dijadikan acuan adalah Keppres 25 Tahun 1995, apakah KTBG mengetahui keppres itu ?	Sepengetahuan saya, peran KTBG hanya masalah penanganan perencanaan pengembangan tugu nasional sedangkan di luar tugu nasional merupakan tanggung jawab dinas teknis lainnya.
9.	Jadi, KTBG tidak memiliki masterplan penataan fisik di kawasan monas ?	Untuk masalah implementasi masterplan penataan fisik silahkan menanyakan langsung kepada dinas terkait.
10.	Strategi apa yang dianggap paling tepat dalam pengelolaan monas yang efektif dan efisien ?	Perbaiki koordinasi, dengan penetapan aturan atau petunjuk pelaksanaan yang jelas artinya jangan sampai pembangunan fisik dilaksanakan oleh dua dinas secara bersama-sama pada lahan yang sama.

HASIL WAWANCARA

Narasumber : Kepala Badan Pengelola Parkir Taman Monas

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Bagaimana latar belakang dan payung hukum keterlibatan BP Parkir dalam pengelolaan kawasan monumen nasional?	Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 158 Tahun 2000 tentang Juklak pengelolaan dan pelestarian monumen nasional di Propinsi DKI Jakarta. BP Parkir adalah salah satu dari 12 unit yang termasuk dalam pengelolaan monumen nasional.
2.	Bagaimana uraian tugas dari BP. Perparkiran?	Dalam juklak, BP. Perparkiran mempunyai tugas pelaksanaan pengelolaan perparkiran kendaraan bermotor di lahan parkir monas (ex IRTI) dan lahan parkir lainnya di area taman medan merdeka.
3.	Terkait dengan pembangunan fisik di kawasan monas, sejauh mana keterkaitan BP. Parkir dengan keseluruhan pembangunan fisik yang dilaksanakan?	Pembangunan fisik yang menjadi tugas dari BP. Perparkiran hanya berkisar pengelolaan lahan parkir di area taman medan merdeka, sedangkan pembangunan fisik yang katanya akan dibangun lahan parker bawah tanah belum terealisasi.
4.	Dalam pembangunan kawasan medan merdeka yang dijadikan acuan adalah Keppres 25 Tahun 1995, apakah BP. Perparkiran mengetahui keppres itu ?	BP Perparkiran saat ini hanya bersifat pengelolaan mengingat untuk pengembangan selanjutnya menunggu arahan dari bapeda.

5.	Bagaimana koordinasi antar dinas teknis yang secara bersama-sama melaksanakan pengelolaan monumen nasional ?	Kegiatan koordinasi hanya sebatas apabila ada kegiatan penting yang akan dilaksanakan sedangkan secara regular belum dilaksanakan antar dinas terkait tersebut.
6.	Jadi, BP. Perparkiran tidak memiliki masterplan penataan fisik di kawasan monas ?	Untuk masalah implementasi masterplan penataan fisik silahkan menanyakan langsung kepada dinas terkait. Namun saat ini sedang dilaksanakan pembangunan lapangan upacara bagi karyawan DKI di sebagian lahan parkir ex IRTI.
7.	Dalam masterplan tidak direncanakan akan dibangun tempat upacara, sedangkan lahan parkir di ex IRTI pun tidak sesuai dengan masterplan, apakah bapak mengetahui hal ini?	Yang terpenting dari BP. Perparkiran adalah bagaimana caranya pengunjung monas dapat memarkir kendaraannya dengan aman di lahan parkir. Sedangkan kesesuaian dengan masterplan silahkan menanyakan langsung kepada dinas perhubungan, apakah jadi akan dibangun lahan parkir bawah tanah.
8.	Strategi apa yang dianggap paling tepat dalam pengelolaan monas yang efektif dan efisien ?	Perbaiki koordinasi, dengan penetapan aturan atau petunjuk pelaksanaan yang jelas artinya jangan sampai pembangunan fisik dilaksanakan oleh dua dinas secara bersama-sama pada lahan yang sama.

HASIL WAWANCARA

Narasumber : Kepala Sub Dinas Bina Program Dinas Perhubungan

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Bagaimana latar belakang dan payung hukum keterlibatan Dinas Perhubungan dalam pengelolaan kawasan monumen nasional?	Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 158 Tahun 2000 tentang Juklak pengelolaan dan pelestarian monumen nasional di Propinsi DKI Jakarta. Dinas Perhubungan atau dulu dikenal Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya adalah salah satu dari 12 unit yang termasuk dalam pengelolaan monumen nasional.
2.	Bagaimana uraian tugas dari Dinas Perhubungan?	Dalam juklak, Dinas Perhubungan mempunyai tugas penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pengaturan lalu lintas di jalur jalan silang monas. Serta pengadaan sarana petunjuk jalan, rambu (street furniture) guna memudahkan pengemudi bila ingin menuju kawasan monas.
3.	Apakah ada penerapan aturan khusus mengenai pengaturan lalu lintas di kawasan monas?	Dinas Perhubungan melakukan pengaturan khusus yakni pelarangan kendaraan bermotor masuk ke dalam jalan silang monas. Selain itu jalan medan merdeka barat termasuk kategori jalan yang hanya boleh dilalui kendaraan bermuatan 3 orang (3 in 1) pada jam tertentu.
4.	Dengan adanya pelarangan kendaraan masuk ke jalan silang monas, apakah akan mempengaruhi aksesibilitas?	Larangan dimaksudkan agar taman monas tidak kotor dan penuh macet dengan kendaraan, pengunjung monas dapat menitipkan kendaraannya di lahan parkir ex IRTI untuk selanjutnya berjalan menuju taman monas.

5.	Bagaimana dengan sarana transportasi missal dari dan menuju monas?	Saat ini, disediakan sarana transportasi Trans Jakarta (Busway) yang melintasi jalan medan merdeka. Saat ini terdapat 3 (tiga) halte busway yakni Gambir 1, Gambir 2 dan Monas. Sehingga memudahkan pengunjung dari dan menuju monas.
6.	Terkait dengan pembangunan fisik di kawasan monas, sejauh mana keterkaitan Dinas Perhubungan dengan keseluruhan pembangunan fisik yang dilaksanakan?	Pembangunan fisik yang menjadi tugas dari Dinas Perhubungan hanya terkait perencanaan pembangunan lahan parkir bawah tanah yang entah kapan akan direalisasikan.
7.	Dalam pembangunan kawasan medan merdeka yang dijadikan acuan adalah Keppres 25 Tahun 1995, apakah Dinas Perhubungan mengetahui keppres itu ?	Dinas Perhubungan saat ini hanya bersifat pengelolaan arus lalu lintas, untuk pengembangan pembangunan fisik lainnya selanjutnya menunggu arahan dari bapeda atau dinas teknis lainnya.
8.	Bagaimana koordinasi antar dinas teknis yang secara bersama-sama melaksanakan pengelolaan monumen nasional ?	Kegiatan koordinasi hanya sebatas apabila ada kegiatan penting yang akan dilaksanakan seperti perayaan HUT Kota Jakarta, dan lain-lain. sedangkan secara regular belum dilaksanakan antar dinas terkait tersebut.
9.	Jadi, Dinas perhubungan tidak memiliki masterplan penataan fisik di kawasan monas ?	Untuk masalah implementasi masterplan penataan fisik silahkan menanyakan langsung kepada dinas terkait. Namun saat ini sedang dilaksanakan pembangunan lapangan upacara bagi karyawan DKI di sebagian lahan parkir ex IRTI yang saat ini melibatkan Dinas Perhubungan.
10.	Dalam masterplan tidak direncanakan akan dibangun tempat upacara, sedangkan lahan parkir di ex IRTI pun tidak sesuai dengan masterplan, apakah bapak mengetahui hal ini?	Pembangunan tempat upacara merupakan kebijakan Gubernur yang mengeluh karena tidak memiliki tempat upacara yang memadai.
11.	Strategi apa yang dianggap paling tepat dalam pengelolaan monas yang efektif dan efisien ?	Pembenahan masalah koordinasi, dengan penetapan aturan atau petunjuk pelaksanaan yang jelas.

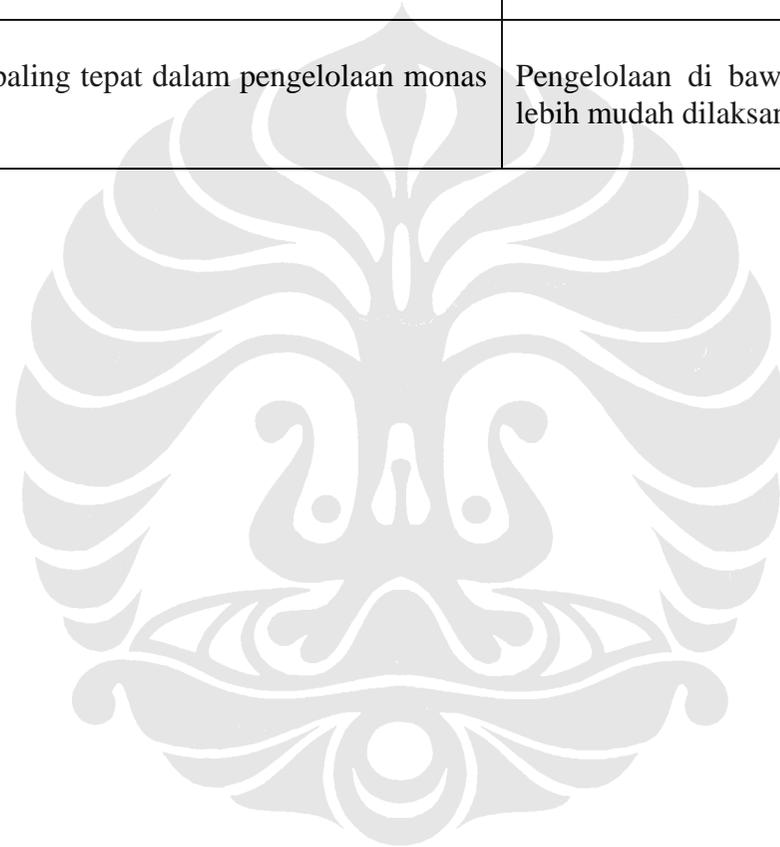
HASIL WAWANCARA

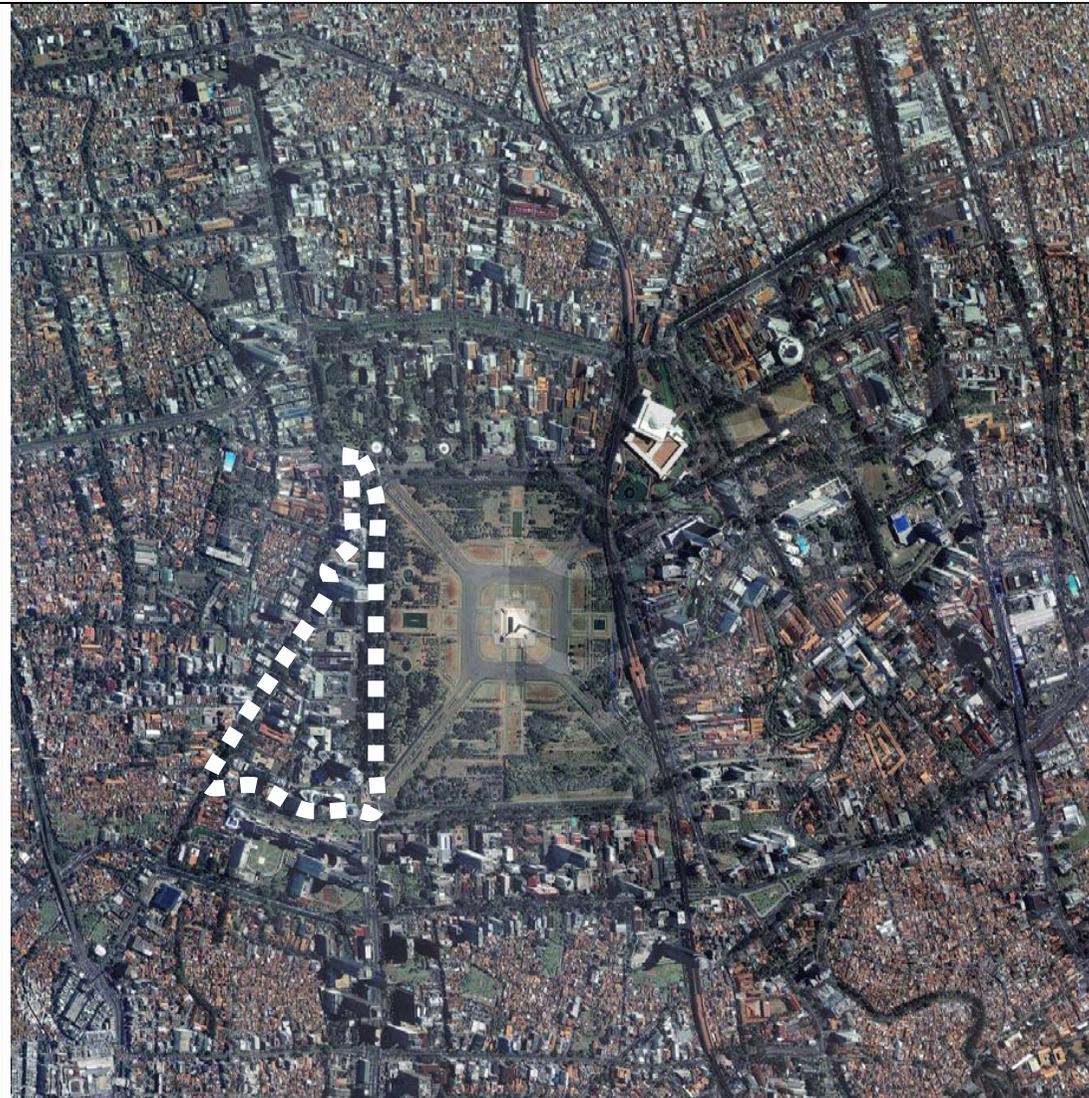
Narasumber : Kepala Dinas Trantib dan Linmas Propinsi DKI Jakarta

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Bagaimana latar belakang dan payung hukum keterlibatan Dinas Trantib dan Linmas dalam pengelolaan kawasan monumen nasional?	Monumen Nasional terletak di jantung kota Jakarta, pada kawasan ini terdapat istana Negara, kantor kementerian Negara, balaikota dan tempat vital lainnya yang perlu dijaga ketentraman dan ketertibannya. Oleh karena itu berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 158 Tahun 2000 tentang Juklak pengelolaan dan pelestarian monumen nasional di Propinsi DKI Jakarta. Dinas Trantib dan Linmas ditetapkan sebagai salah satu dari 12 unit yang termasuk dalam pengelolaan monumen nasional.
2.	Bagaimana uraian tugas dari Dinas Trantib dan Linmas ?	Dinas Trantib dan Linmas mempunyai tugas menangani ketertiban umum di areal taman medan merdeka.
3.	Sampai sejauh mana ruang lingkup kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Trantib dan Linmas ?	Dinas Trantib dan Linmas hanya menangani masalah ketertiban di kawasan monas, dari ancaman para Penyandang Masalah Kerawanan Sosial (PMKS). Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Trantib dan Linmas selalu berkoordinasi dengan aparat dari Walikotamadya Jakarta Pusat, Camat Gambir dan Lurah Gambir serta penanganan selanjutnya oleh Dinas Sosial.
4.	Bagaimana koordinasi penanganan ketertiban antar dinas teknis yang secara bersama-sama melaksanakan pengelolaan monumen nasional ?	Pelaksanaan koordinasi diatur dalam Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 158 Tahun 2000 tentang Juklak pengelolaan dan pelestarian monumen nasional yang membagi bidang tugas sesuai dengan kapasitas dinas teknisnya. Selama ini koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Trantib dan Linmas antara lain dengan Walikotamadya Jakarta Pusat beserta jajarannya dan dinas sosial dalam pengelolaan ketertiban di kawasan monas. Sedangkan dinas

		lain jarang melakukan koordinasi dengan Dinas Trantib dan Linmas
5.	Bagaimana intensitas koordinasi dengan dinas terkait dalam pengelolaan kawasan monas ?	Kegiatan koordinasi hanya dilaksanakan apabila ada kegiatan penting yang akan dilaksanakan di area taman monas yang memerlukan pengamanan dari Dinas Trantib dan Linmas. Artinya hanya sebatas urgenitas saja sedangkan secara regular belum dilaksanakan antar dinas terkait tersebut. Penanganan ketertiban umum dibagi menjadi 3 ring atau zone, yakni zone inti (taman monas), zone penyangga dan zone pelindung.
6.	Bagaimana peran dari Dinas Trantib dan Linmas dalam pengamanan di area taman monas ?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penempatan personil di area taman monas sebanyak 2 regu. 2. Penjagaan pintu masuk (pintu gerbang) 3. Penyediaan sarana pengamanan, seperti mobil, motor keliling guna mengantisipasi terjadinya gangguan ketertiban. 4. Kegiatan penertiban terpadu bekerjasama dengan dinas lainnya.
7.	Apakah peran dari Dinas Trantib dan Linmas hampir sama dengan peran dari Walikotamadya Jakarta Pusat?	Menurut sepengetahuan saya, peran dari Walikotamadya Jakarta Pusat seharusnya lebih mengarah kepada kewilayahan dan kependudukan sedangkan penertiban seharusnya dititikberatkan kepada Dinas Trantib dan Linmas.
8.	Berarti terdapat tumpang tindih atau duplikasi pekerjaan?	Iya, namun peran Walikotamadya lebih kompleks mengingat Walikotamadya memiliki jajaran suki dinas teknis lainnya yang cukup banyak sehingga memudahkan pelaksanaannya.
9.	Terkait dengan pembangunan fisik di kawasan monas, apakah Dinas Trantib dan Linmas terlibat ?	Dinas Trantib dan Linmas tidak menangani langsung masalah pembangunan fisik, karena diserahkan kepada dinas atau sudin teknis terkait.

10.	Dalam pembangunan kawasan medan merdeka yang dijadikan acuan adalah Keppres 25 Tahun 1995, apakah Dinas Trantib dan Linmas mengetahui keppres itu ?	Sepengatahuan saya, sewaktu saya masih menjabat Kepala Dinas Pariwisata, keppres itu merupakan acuan dalam pengembangan taman monas yang terkait dengan pembangunan fisik, batas wilayah, kelembagaan dan pembiayaan.
11.	Strategi apa yang dianggap paling tepat dalam pengelolaan monas yang efektif dan efisien ?	Pengelolaan di bawah satu badan khusus agar koordinasi dapat lebih mudah dilaksanakan.





Bank Indonesia
PT. Indosat
Gedung Sapta Pesona Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
Ditjen Pos dan Telekomunikasi Departemen Komunikasi dan Informasi
Kementerian Pemberdayaan Perempuan
Sekjen Dewan Ketahanan Nasional
Departemen Pertahanan
Museum Gajah / Museum Nasional
Departemen Komunikasi dan Informasi
Departemen Perhubungan
Mahkamah Konstitusi
Radio Republik Indonesia
Kantor Menko Kesra
PT. Berdikari Insurance (Persero)
Kementerian Percepatan Daerah Tertinggal
Bank Mandiri
PT. Samanta Waja
Bank Yudha
RM. Sederhana
Permukiman warga RT. 002, 003 RW.04 Kel. Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat

Gambar 5.1 Deskripsi peruntukan kawasan civic centre sebelah barat



Gambar 5.2 Deskripsi peruntukan kawasan civic centre sebelah timur

Departemen Kelautan dan Perikanan
PN. Timah
Galeri Nasional Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
Wisma Pertamina
Pertamina Medical Centre
Gereja Immanuel
Itjen Departemen Dalam negeri
Kwarda
Diklat Departemen Perhubungan
Mabes TNI Garnisun I
Kostrad
Pertamina
Bank Mandiri
Puspom AD
Kedubes Vatikan
PLN
Pertamina
Departemen Perdagangan
Pertamina
Disnaker DKI
Bank Danamon
Arya Duta Hotel
Dewan Kerajinan Nasional
Marinir
Bank Mandiri
Perusahaan Gas Negara
Fartrust Education Centre
Permukiman masyarakat RT.001, 002, 003, 004, 007, 008, 009, 015 dan 016 RW. 01 Kelurahan Gambar

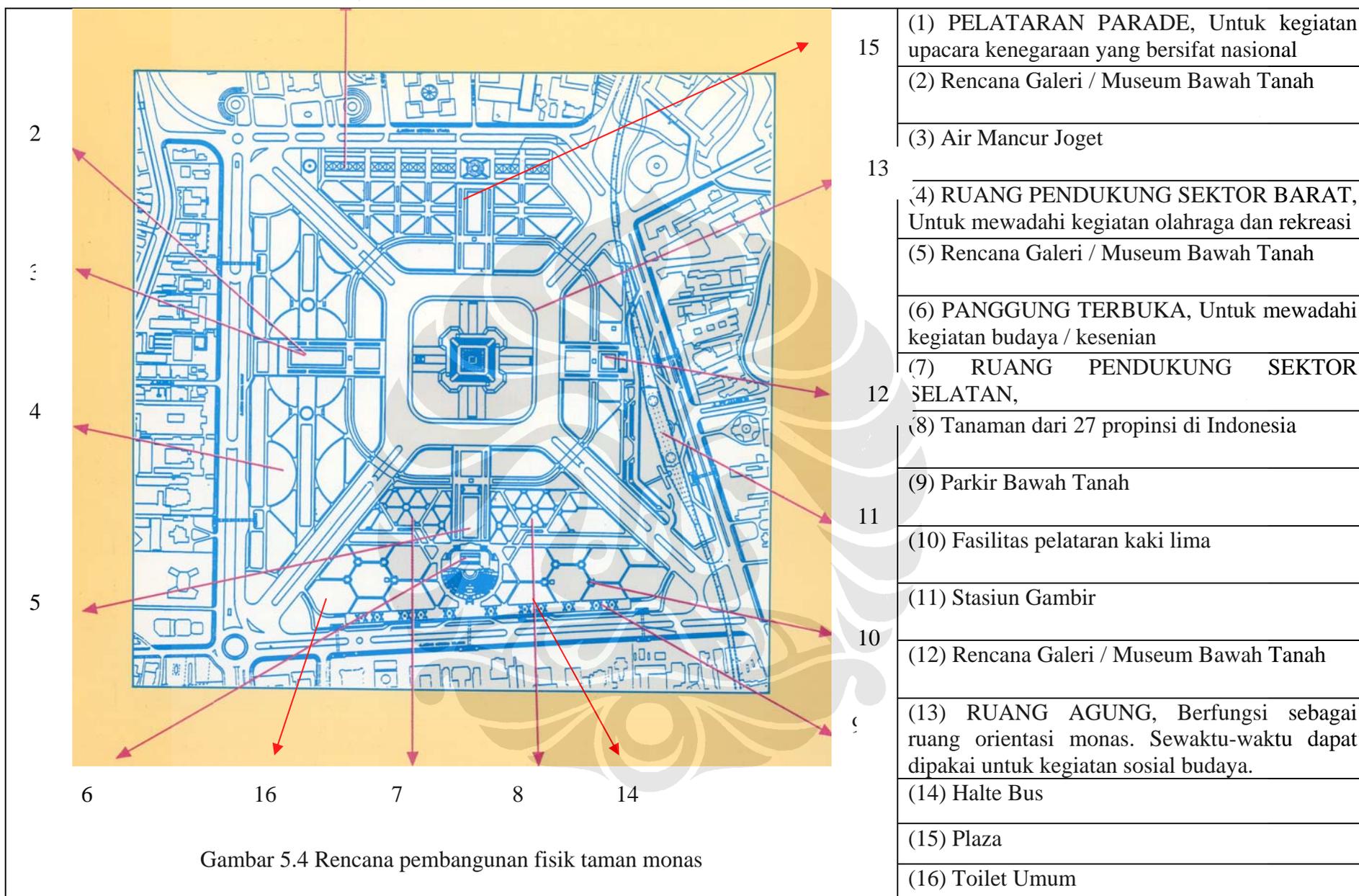


Gambar 5.3 Deskripsi peruntukan kawasan civic centre sebelah utara

Mabes TNI AD
Departemen Dalam Negeri
Mahkamah Agung
Istana Merdeka
Sekretariat Negara
Gedung Serbaguna Sekneg
Dirjen Pemasaryakatan Departemen Hukum dan Ham
Lembaga Administrasi Negara
PT. Kimia Farma
Ruko
BRI
Mesjid At Taqwa
Hotel Sriwijaya
Mesjid Istiqlal
Gereja Katedral
Santa Ursula
Filateli Jakarta
Gedung Kesenian Jakarta
PT. Pos Indonesia
Departemen Keuangan
Departemen Agama
Departemen Luar Negeri
RM. Baba
Restaurant Ragusa Ice Cream
RM. Depot 62
Queen Tandor
RM. King
RM. Sari Bundo
Sea Food Restaurant
RM. Donos
Permukiman warga RT.005, 011 RW. 02

	Menteri Negara Energi dan Sumber Daya Mineral
	Wisma Antara
	Hotel Sabang
	Garuda Indonesia Airways
	Telkom
	Perpustakaan Nasional
	Lemhanas
	Balaikota DKI Jakarta
	Istana Wakil Presiden
	Kedubes Amerika Serikat
	Gedung DPRD DKI Jakarta
	Dewan Pers
	Toba resto & bar
Lembaga pendidikan telekomunikasi	

Gambar 5.4 Deskripsi peruntukan kawasan civic centre sebelah selatan



Gambar 5.4 Rencana pembangunan fisik taman monas

ANALISIS SWOT OPTIMASI PEMANFAATAN TAMAN MONAS SEBAGAI CIVIC CENTRE

OPPORTUNITY

1. Kebutuhan ruang publik bagi masyarakat kota Jakarta untuk beraktivitas rekreasi semakin tinggi.
2. Areal taman monas sangat luas apabila dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan.
3. Indikasi minat pihak swasta untuk turut serta mengembangkan taman monas sebagai bagian bantuan kegiatan sosial perusahaan terhadap fasilitas kota.
4. Tingginya respons para pemerhati kota dan akademisi terhadap penataan kawasan monas.

STRENGTH

1. Lokasi strategis, berada di pusat kota Jakarta, mudah ditempuh dari penjuru kota.
2. Telah memiliki kebijakan pemerintah sebagai alat pengendali penataan kawasannya (masterplan, PRK, dll).
3. Adanya petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan monas yang mengatur tugas dan fungsi instansi pemerintah terkait.
4. Landmark kota Jakarta dan Indonesia, pusat perhatian nasional dan internasional

THREATS

1. Keberadaan mall sebagai sarana rekreasi baru bagi warga kota Jakarta semakin diminati.
2. Fasilitas taman monas sangat terbatas sehingga warga kota cenderung melakukan kegiatan di tempat lain.
3. Bantuan kegiatan sosial perusahaan swasta / investasi sering terhambat karena swasta lebih memilih membantu di sektor lain.
4. Sikap apatis pemerhati kota dan akademisi karena respon mereka tidak pernah diperhatikan

WEAKNESSES

1. Berada di lingkungan perkantoran pemerintah dan jauh dari permukiman.
2. Implementasi penataan kawasan yang belum sesuai dari rencana yang digariskan.
3. Koordinasi tidak berjalan baik akibat konflik kepentingan.
4. Tidak ada aturan baku untuk keterlibatan swasta
5. Tidak ada wadah untuk menampung aspirasi pemikiran para pemerhati kota dan akademisi.

